

**Tabel 4. 6**  
**Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bandung**

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
<b>VISI: MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, TERBUKA, AMANAH, MAJU DAN AGAMIS MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI MELAYANI SERTA BERKELANJUTAN DALAM Mendukung Pembangunan Nasional</b>						
<b>Misi 1. Mewujudkan Kualitas Hidup Warga Kota Bandung yang Unggul</b>						
	<b>Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia</b>			<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>		
		<b>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata</b>		<b>Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)</b>		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita		
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
		<b>Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang merata</b>		<b>Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)</b>		
				<b>Harapan Lama Sekolah (tahun)</b>		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		<b>Meningkatnya standar hidup yang layak</b>		<b>Pengeluaran Per Kapita</b>		
			Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA		
				Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar		
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		
<b>Misi 2. Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan</b>						
	<b>Meningkatnya Daya Saing Kota dan Pemerataan Pembangunan</b>			<b>Indeks Daya Saing Daerah</b>		
				<b>Gini Ratio</b>		
		<b>Meningkatnya Pembangunan inklusif</b>		<b>Tingkat Kemiskinan</b>		
				<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>		
			Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar		
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
				Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan
			Meningkatnya perlindungan terhadap pekerja	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Ketenagakerjaan
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran,	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak			
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Meningkatnya kualitas kebijakan kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah, serta kesejahteraan rakyat	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah		
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah		
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah		
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
<b>Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Inovatif</b>						
	<b>Penguatan Fondasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>			<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>		
		<b>Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak</b>		<b>Nilai Reformasi Birokrasi General</b>		
			Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah
				Persentase perangkat daerah mendapatkan Nilai SAKIP minimal B		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
				Persentase Penurunan SILPA		
				Persentase laporan keuangan tepat waktu		
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya		
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsiona	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan		
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan
<b>Misi 4. Mewujudkan Kota Bandung yang Maju, Kreatif, dan Berdaya Saing Dalam Perekonomian dan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan</b>						
	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi ramah lingkungan yang didukung infrastruktur yang berkualitas</b>			<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>		
				<b>PDRB Per Kapita</b>		
		<b>Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah yang mapan dan berkelanjutan</b>		<b>Indeks Ekonomi Hijau Daerah Pilar Ekonomi</b>		
				<b>Indeks Kota Kreatif</b>		
				<b>Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB</b>		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOOPERASI	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOOPERASI	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan		
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		
		<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur</b>		<b>Indeks Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Infrastruktur</b>		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob		
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas		
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program pemerintah yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Luas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
		<b>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</b>		<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>		
				<b>Penurunan Intensitas Emisi GRK</b>		
				<b>Indeks Risiko Bencana</b>		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas pengendalian B3 dan Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan	Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN	Dinas Lingkungan Hidup

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana		
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
			Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial
<b>Misi 5. Membentuk Karakter Warga Kota Bandung yang Agamis, Moderat, dan Toleran</b>						
	<b>Meningkatnya karakter masyarakat yang agamis, berbudaya, moderat dan toleran</b>			<b>Indeks Harmoni Indonesia</b>		
		<b>Meningkatnya pembangunan kebudayaan serta keharmonisan dan kerukunan beragama</b>		<b>Indeks Pembangunan Kebudayaan</b>		
				<b>Indeks Harmoni Religius</b>		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah, serta kesejahteraan rakyat	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah

Sumber: RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029

**Tabel 4. 7**

**KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>				
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86.13	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86.13	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pendidikan
	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran	Persen	100		Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran	Persen	100	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
Meningkatnya Aksesibilitas Siswa PAUD Formal	Rasio Penduduk Usia PAUD terhadap ketersediaan rombongan belajar di Satuan Pendidikan PAUD	Rasio	19.474	Meningkatnya Aksesibilitas Siswa PAUD Formal	Rasio Penduduk Usia PAUD terhadap ketersediaan rombongan belajar di Satuan Pendidikan PAUD	Rasio	19.474	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pendidikan
	Angka Putus Sekolah Jenjang PAUD	Persen	0.0035		Angka Putus Sekolah Jenjang PAUD	Persen	0.0035	
Meningkatnya Aksesibilitas Siswa Kesetaraan	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi SMA ke atas	Persen	58.09	Meningkatnya Aksesibilitas Siswa Kesetaraan	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi SMA ke atas	Persen	58.09	
	Persentase Anak Tidak Sekolah	Persen	3.35		Persentase Anak Tidak Sekolah	Persen	3.35	
Meningkatnya Aksesibilitas Siswa Sekolah Dasar	Rasio Penduduk Usia SD terhadap ketersediaan rombongan belajar di Satuan Pendidikan SD	Rasio	30.187	Meningkatnya Aksesibilitas Siswa Sekolah Dasar	Rasio Penduduk Usia SD terhadap ketersediaan rombongan belajar di Satuan Pendidikan SD	Rasio	30.187	
	Angka Putus Sekolah Jenjang SD	Persen	0.66		Angka Putus Sekolah Jenjang SD	Persen	0.66	
Meningkatnya Aksesibilitas Siswa Sekolah Menengah Pertama	Rasio Penduduk Usia SMP terhadap ketersediaan rombongan	Rasio	34.729	Meningkatnya Aksesibilitas Siswa Sekolah Menengah Pertama	Rasio Penduduk Usia SMP terhadap ketersediaan rombongan	Rasio	34.729	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
	belajar di Satuan Pendidikan SMP				belajar di Satuan Pendidikan SMP			
	Angka Putus Sekolah Jenjang SMP	Persen	1.79		Angka Putus Sekolah Jenjang SMP	Persen	1.79	
Meningkatnya Iklim Pendidikan	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	62.52	Meningkatnya Iklim Pendidikan	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	62.52	
	Iklim Keamanan SD	Nilai	77.15		Iklim Keamanan SD	Nilai	77.15	
	Iklim Kebinekaan SD	Nilai	74.60		Iklim Kebinekaan SD	Nilai	74.60	
	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	64.88		Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	64.88	
	Iklim Keamanan SMP	Nilai	76.46		Iklim Keamanan SMP	Nilai	76.46	
	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	74.35		Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	74.35	
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Skor Kemampuan Literasi SD	Nilai	73.35	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Skor Kemampuan Literasi SD	Nilai	73.35	
	Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	61.02		Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	61.02	
	Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	83.15		Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	83.15	
	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	71.21		Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	71.21	
	Skor Kemampuan Literasi Dasar PAUD	Nilai	70.00		Skor Kemampuan Literasi Dasar PAUD	Nilai	70.00	
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang Kompeten	Persen	99.5	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang Kompeten	Persen	99.5	
	Persentase Tenaga Kependidikan Lainnya yang Kompeten	Persen	98.65		Persentase Tenaga Kependidikan Lainnya yang Kompeten	Persen	98.65	
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persen	92.72		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persen	92.72	
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
	Persentase Peserta Didik yang memahami mulok	Persen	90.00		Persentase Peserta Didik yang memahami mulok	Persen	90.00	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pendidikan
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
Meningkatnya Indeks Distribusi Guru	Indeks Distribusi Guru	Nilai	0.700	Meningkatnya Indeks Distribusi Guru	Indeks Distribusi Guru	Nilai	0.700	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pendidikan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
Menurunnya Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi	Per 1000 Kelahiran Hidup	12,62	Menurunnya Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi	Per 1000 Kelahiran Hidup	12,62	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
Menurunnya Angka Kematian Neonatal	Angka Kematian Neonatal	Per 1000 Kelahiran Hidup	9,2	Menurunnya Angka Kematian Neonatal	Angka Kematian Neonatal	Per 1000 Kelahiran Hidup	9,2	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
Menurunnya Angka Kehamilan Remaja	Angka Kehamilan Remaja			Menurunnya Angka Kehamilan Remaja	Angka Kehamilan Remaja			Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Daan Makanan Minuman				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Daan Makanan Minuman				
Menurunnya Angka Still Birth	Angka Still Birth	Per 1000 Kelahiran Hidup	7,20	Menurunnya Angka Still Birth	Angka Still Birth	Per 1000 Kelahiran Hidup	7,20	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
Menurunnya Prevalensi Wasting Balita	Prevalensi Wasting Balita	Prevalensi	8	Menurunnya Prevalensi Wasting Balita	Prevalensi Wasting Balita	Prevalensi	8	
Menurunnya Insiden Stunting balita (kasus baru)	Insiden Stunting balita (kasus baru)		3	Menurunnya Insiden Stunting balita (kasus baru)	Insiden Stunting balita (kasus baru)		3	
Meningkatnya Populasi Bebas PTM	Angka Populasi Bebas PTM	Persen	100	Meningkatnya Populasi Bebas PTM	Angka Populasi Bebas PTM	Persen	100	
Meningkatnya Angka Populasi Bebas PM	Angka Populasi Bebas PM			Meningkatnya Angka Populasi Bebas PM	Angka Populasi Bebas PM			
Meningkatnya cakupan imunisasi seluruh siklus hidup minimal 90%	Persentase cakupan imunisasi seluruh siklus hidup minimal 90%	Persen	100	Meningkatnya cakupan imunisasi seluruh siklus hidup minimal 90%	Persentase cakupan imunisasi seluruh siklus hidup minimal 90%	Persen	100	
Meningkatnya Tingkat aktivitas fisik	Tingkat aktivitas fisik			Meningkatnya Tingkat aktivitas fisik	Tingkat aktivitas fisik			

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Meningkatnya Capaian STBM	Persentase Capaian STBM		Meningkatnya Capaian STBM	Persentase Capaian STBM				
Menurunnya Prevalensi Obesitas	Prevalensi Obesitas		Menurunnya Prevalensi Obesitas	Prevalensi Obesitas				
Meningkatnya Rasio Named Nakes terhadap populasi	Rasio Named Nakes terhadap populasi	orang	23466	Meningkatnya Rasio Named Nakes terhadap populasi	Rasio Named Nakes terhadap populasi	orang	23466	
Meningkatnya Proporsi fasilitas Kesehatan sesuai standar	Proporsi fasilitas Kesehatan sesuai standar			Meningkatnya Proporsi fasilitas Kesehatan sesuai standar	Proporsi fasilitas Kesehatan sesuai standar			
Meningkatnya Proporsi faskes dengan perbekalan Kesehatan sesuai standar	Proporsi faskes dengan perbekalan Kesehatan sesuai standar			Meningkatnya Proporsi faskes dengan perbekalan Kesehatan sesuai standar	Proporsi faskes dengan perbekalan Kesehatan sesuai standar			
Meningkatnya Proporsi fasyankes yang mencapai akreditasi "utama" atau lebih tinggi	Proporsi fasyankes yang mencapai akreditasi "utama" atau lebih tinggi	Faskes	91,56	Meningkatnya Proporsi fasyankes yang mencapai akreditasi "utama" atau lebih tinggi	Proporsi fasyankes yang mencapai akreditasi "utama" atau lebih tinggi	Faskes	91,56	
Meningkatnya Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan	Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan	Nilai	87.25	Meningkatnya Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan	Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan	Nilai	87.25	
Meningkatnya masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	Persen	80	Meningkatnya masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	Persen	80	
Meningkatnya Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)			Meningkatnya Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)			
Meningkatnya Indeks Kesehatan lingkungan	Indeks kesehatan lingkungan		N/A	Meningkatnya Indeks Kesehatan lingkungan	Indeks kesehatan lingkungan		N/A	
Meningkatnya Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN			Meningkatnya Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN			
Meningkatnya Proporsi populasi yang menggunakan SIKN	Proporsi populasi yang menggunakan SIKN			Meningkatnya Proporsi populasi yang menggunakan SIKN	Proporsi populasi yang menggunakan SIKN			
<b>RSUD BANDUNG KIWARI</b>				<b>RSUD BANDUNG KIWARI</b>				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Meningkatnya kepuasan pasien terhadap pelayanan di RSUD Bandung Kiwari	Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Bandung Kiwari	Nilai	90.03	Meningkatnya kepuasan pasien terhadap pelayanan di RSUD Bandung Kiwari	Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Bandung Kiwari	Nilai	90.03	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Fasilitas kesehatan lanjutan sesuai standar	Persen	84.00	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Fasilitas kesehatan lanjutan sesuai standar	Persen	84.00	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
	Persentase Fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan	Persen	100		Persentase Fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
	Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi	Persen	100		Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
	Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Terintegrasi	Persen	100		Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Terintegrasi	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar	Persentase Tenaga medis dan Tenaga Kesehatan sesuai standar	Persen	63.97	Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar	Persentase Tenaga medis dan Tenaga Kesehatan sesuai standar	Persen	63.97	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
<b>RSUD UJUNG BERUNG</b>				<b>RSUD UJUNG BERUNG</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Rasio Nakes dan Named terhadap populasi	Persen	100	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Rasio Nakes dan Named terhadap populasi	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
Meningkatnya tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan	Persentase Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan (IKM)	Persen	87.80	Meningkatnya tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan	Persentase Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan (IKM)	Persen	87.80	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persen	100	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan		
	Persentase fasilitas kesehatan lanjutan sesuai standar (SPA)			Persentase fasilitas kesehatan lanjutan sesuai standar (SPA)				
	Persentase faskes dengan perbekalan kesehatan (diagnostics, obat, vaksin, reagen, BMHP) sesuai standar	100		Persentase faskes dengan perbekalan kesehatan (diagnostics, obat, vaksin, reagen, BMHP) sesuai standar	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan		
	Persentase faskes mencapai akreditasi paripurna	100		Persentase faskes mencapai akreditasi paripurna	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan		
<b>RSKGM</b>			<b>RSKGM</b>					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Nilai	97	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Nilai	97	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan		
	Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan			Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
Meningkatnya Akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persen	77.97	Meningkatnya Akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persen	77.97	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan		
	Fasilitas Kesehatan lanjutan sesuai standar			Fasilitas Kesehatan lanjutan sesuai standar				
						Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
Meningkatnya pemenuhan SDM sesuai standar	Persen	39.2	Meningkatnya pemenuhan SDM sesuai standar	Persen	39.2	Perangkat Daerah		
	Tenaga medis dan Tenaga Kesehatan sesuai standar			Tenaga medis dan Tenaga Kesehatan sesuai standar				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
								pelaksana Urusan Kesehatan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	81.46	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	81.46	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keseekretariatan	Poin	100	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keseekretariatan	Poin	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indeks Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan	Poin	100		Indeks Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan	Poin	100	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan	Poin	100		Indeks Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan	Poin	100	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan	Poin	100		Indeks Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan	Poin	100	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan	Poin	100		Indeks Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan	Poin	100	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan	Poin	100		Indeks Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan	Poin	100	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan	Poin	100		Indeks Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan	Poin	100	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Indeks Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan	Poin	100	Indeks Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan	Poin	100			
Indeks Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan	Poin	100	Indeks Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan	Poin	100			
Indeks Kepuasan Pelayanan Peralatan, Perbengkelan, dan Ketatausahaan	Poin	100	Indeks Kepuasan Pelayanan Peralatan, Perbengkelan, dan Ketatausahaan	Poin	100			
Indeks Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan	Poin	100	Indeks Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan	Poin	100			
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>					
Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi mantap melalui pembangunan dan pemeliharaan berkala jalan	Persen	2.64	Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi mantap melalui pembangunan dan pemeliharaan berkala jalan	Persen	2.64	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Terkendalnya kualitas bahan konstruksi pekerjaan penyelenggaraan jalan	Persen	100	Terkendalnya kualitas bahan konstruksi pekerjaan penyelenggaraan jalan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan secara merata dan berkelanjutan	Persen	100	Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan secara merata dan berkelanjutan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin	Persen	100	Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin	Persen	100			
Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin	Persen	100	Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin	Persen	100			

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin	Persen	100	Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin	Persen	100			
Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin	Persen	100	Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin	Persen	100			
Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin	Persen	100	Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin	Persen	100			
Terehabilitasinya Ruas-Ruas Jalan yang membutuhkan penanganan segera (insidental)	Persen	100	Terehabilitasinya Ruas-Ruas Jalan yang membutuhkan penanganan segera (insidental)	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Meningkatnya cakupan penyelenggaraan trotoar inklusif secara merata dan berkelanjutan	Persen	18.85	Meningkatnya cakupan penyelenggaraan trotoar inklusif secara merata dan berkelanjutan	Persen	18.85	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
Meningkatnya Kapasitas Resapan Air	Persen	7.8	Meningkatnya Kapasitas Resapan Air	Persen	7.8	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Meningkatnya Kapasitas Parkir Air	Persen	84.28	Meningkatnya Kapasitas Parkir Air	Persen	84.28	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH		
Meningkatnya Kapasitas Aliran Sungai	Persentase Kapasitas Aliran Sungai	Persen	100	Meningkatnya Kapasitas Aliran Sungai	Persentase Kapasitas Aliran Sungai	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur SDA secara merata dan berkelanjutan	Persentase Pemeliharaan Rutin Infrastruktur SDA	Persen	100	Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur SDA secara merata dan berkelanjutan	Persentase Pemeliharaan Rutin Infrastruktur SDA	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya Kapasitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Sistem Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	Persen	28.68	Meningkatnya Kapasitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Sistem Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	Persen	28.68	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan secara merata dan berkelanjutan	Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan	Persen	100	Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan secara merata dan berkelanjutan	Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan	Persen	100		Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan	Persen	100	
	Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan	Persen	100		Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan	Persen	100	
	Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan	Persen	100		Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan	Persen	100	
	Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan	Persen	100		Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan	Persen	100	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET		INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
	Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan	Persen	100		Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan	Persen	100	
Program Penataan Bangunan Gedung				Program Penataan Bangunan Gedung				
Meningkatnya Kualitas Bangunan yang Memenuhi Standar Administrasi dan Teknis	Persentase Perencanaan Bangunan yang Memenuhi Standar Teknis dan Administratif	Persen	NA	Meningkatnya Kualitas Bangunan yang Memenuhi Standar Administrasi dan Teknis	Persentase Perencanaan Bangunan yang Memenuhi Standar Teknis dan Administratif	Persen	NA	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang Memenuhi Standar Teknis	Persentase Pembangunan BANGunan Gedung Negara yang memenuhi ketentuan Standar	Persen	100	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang Memenuhi Standar Teknis	Persentase Pembangunan BANGunan Gedung Negara yang memenuhi ketentuan Standar	Persen	100	
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan				Program Penataan Bangunan dan Lingkungan				
Meningkatnya Wilayah yang Terencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Cakupan Kawasan Yang Terencana Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persen	NA	Meningkatnya Wilayah yang Terencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Cakupan Kawasan Yang Terencana Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persen	NA	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi				Program Pengembangan Jasa Konstruksi				
Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang memiliki Sertifikat Terampil Pekerjaan Konstruksi	Persen	95	Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang memiliki Sertifikat Terampil Pekerjaan Konstruksi	Persen	95	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan Gedung	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan ruang sesuai dengan Ketentuan	Persen	82	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan Gedung	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan ruang sesuai dengan Ketentuan	Persen	82	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
								Penataan Ruang
	Persentase Kebijakan Perencanaan Tata Ruang yang disusun Tepat Waktu	Persen	N/A		Persentase Kebijakan Perencanaan Tata Ruang yang disusun Tepat Waktu	Persen	N/A	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya Kualitas RTH Pemakaman	Persentase terpeliharanya RTH Publik Pemakaman	Persen	37	Meningkatnya Kualitas RTH Pemakaman	Persentase terpeliharanya RTH Publik Pemakaman	Persen	37	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terselenggara dengan Baik	Persen	100.00	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terselenggara dengan Baik	Persen	100.00	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	82.00		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	82.00	
Program Pengembangan Perumahan				Program Pengembangan Perumahan				
Meningkatnya kuantitas dan kualitas hunian layak di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	97.62	Meningkatnya kuantitas dan kualitas hunian layak di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	97.62	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh					
Meningkatnya kuantitas dan kualitas hunian layak di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	97.62	Meningkatnya kuantitas dan kualitas hunian layak di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	97.62	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman			Program Kawasan Permukiman					
Menurunnya luasan kawasan kumuh dan meningkatnya kualitas permukiman	Persentase penurunan kumuh kriteria Jalan lingkungan	Persen	28.31	Menurunnya luasan kawasan kumuh dan meningkatnya kualitas permukiman	Persentase penurunan kumuh kriteria Jalan lingkungan	Persen	28.31	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase penurunan kumuh kriteria drainase lingkungan	Persen	36.56		Persentase penurunan kumuh kriteria drainase lingkungan	Persen	36.56	
	Persentase penurunan kumuh kriteria akses aman air minum tidak tersedia	Persen	23.83		Persentase penurunan kumuh kriteria akses aman air minum tidak tersedia	Persen	23.83	
	Persentase penurunan kumuh kriteria Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku	Persen	9.68		Persentase penurunan kumuh kriteria Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku	Persen	9.68	
	Persentase penurunan kumuh kriteria bangunan gedung	Persen	15.24		Persentase penurunan kumuh kriteria bangunan gedung	Persen	15.24	
Meningkatnya kualitas jalan permukiman	Persentase Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik	Persen		Meningkatnya kualitas jalan permukiman	Persentase Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik	Persen		
Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase rumah tangga memiliki akses terhadap layanan air bersih	Persen	90.86	Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase rumah tangga memiliki akses terhadap layanan air bersih	Persen	90.86	
Meningkatnya pelayanan air limbah domestik	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Setempat	Persen	59.04	Meningkatnya pelayanan air limbah domestik	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Setempat	Persen	59.04	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Meningkatnya kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dari penyerahan PSU dan pengadaan tanah	Persentase Penambahan Luasan RTH Publik dari Serah Terima PSU Perumahan dan Pengadaan Lahan	Persen	0.02	Meningkatnya kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dari penyerahan PSU dan pengadaan tanah	Persentase Penambahan Luasan RTH Publik dari Serah Terima PSU Perumahan dan Pengadaan Lahan	Persen	0.02	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dari Pertamanan dan Dekorasi Kota	Persentase Luasan RTH publik taman, median dan jalur hijau jalan terpelihara	Persen	26.65	Meningkatnya kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dari Pertamanan dan Dekorasi Kota	Persentase Luasan RTH publik taman, median dan jalur hijau jalan terpelihara	Persen	26.65	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				
Meningkatnya Kuantitas RTH Publik Pemakaman	Tersedianya pengembangan lahan untuk pemakaman	Lokasi		Meningkatnya Kuantitas RTH Publik Pemakaman	Tersedianya pengembangan lahan untuk pemakaman	Lokasi		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Pemberdayaan Satlinmas	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan	Persen	60.26%	Meningkatnya Pemberdayaan Satlinmas	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan	Persen	60.26%	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum	Persen	78.1%	Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum	Persen	78.1%	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
	Persen	78.1%		Persen	78.1%			
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
Meningkatnya Layanan Pemadaman Kebakaran sesuai Waktu Tanggap	Persen	100%	Meningkatnya Layanan Pemadaman Kebakaran sesuai Waktu Tanggap	Persen	100%	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
Meningkatnya Layanan Keberhasilan Evakuasi Korban pada Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Persen	n/a	Meningkatnya Layanan Keberhasilan Evakuasi Korban pada Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Persen	n/a			
Meningkatnya Kualitas Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan/Gedung/Lingkungan	Persen	44.48%	Meningkatnya Kualitas Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan/Gedung/Lingkungan	Persen	44.48%			
Persentase Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanggulangan Kebakaran	Persen	n/a	Persentase Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanggulangan Kebakaran	Persen	n/a			
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Bencana yang Terstandarisasi	Persen	76.56%	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Bencana yang Terstandarisasi	Persen	76.56%			

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				
Program Pemberdayaan Sosial				Program Pemberdayaan Sosial				
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial	Persen	84.5	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial	Persen	84.5	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial				Program Rehabilitasi Sosial				
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis, Anak, dan Lansia) yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar	Persen	100	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis, Anak, dan Lansia) yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
Meningkatnya Jaminan dan Perlindungan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	34	Meningkatnya Jaminan dan Perlindungan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	34	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persen	0.05		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persen	0.05	
	Persentase Data Kemiskinan yang dimanfaatkan dalam penanganan kemiskinan	Persen	100		Persentase Data Kemiskinan yang dimanfaatkan dalam penanganan kemiskinan	Persen	100	
Program Penanganan Bencana				Program Penanganan Bencana				
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	100	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Sosial
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100.00	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100.00	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Tenaga Kerja
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
Meningkatnya Tenaga Kerja yang Kompeten	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Tenag a Kerja	139,831,807.51	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Kompeten	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Tenag a Kerja	139,831,807.51	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Tenaga Kerja
	Laju pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja	Persen	1.50		Laju pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja	Persen	1.50	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Persen	52	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Persen	52	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Tenaga Kerja
	Persentase Tenaga Kerja Formal	Persen	57		Persentase Tenaga Kerja Formal	Persen	57	
	Jumlah Lowongan Kerja Baru	orang	3,000		Jumlah Lowongan Kerja Baru	orang	3,000	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
Meningkatnya Tenaga Kerja yang Kompeten	Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	Persen	0.51	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Kompeten	Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	Persen	0.51	Perangkat Daerah pelaksana

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
						Urusan Tenaga Kerja		
Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja		31.43	Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja		31.43			
Tingkat Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi		39.09	Tingkat Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi		39.09			
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>					
Meningkatnya kualitas Hubungan Industrial	Tingkat Peraturan Perusahaan (PP) yang Disahkan	Persen	21.60	Meningkatnya kualitas Hubungan Industrial	Tingkat Peraturan Perusahaan (PP) yang Disahkan	Persen	21.60	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Tenaga Kerja
	Tingkat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Yang Didaftarkan	Persen	0.28		Tingkat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Yang Didaftarkan	Persen	0.28	
	Tingkat Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan	Persen	0.93		Tingkat Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan	Persen	0.93	
	Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	0.70		Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	0.70	
	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	Persen	81		Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	Persen	81	
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>					
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	78.18	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Tingkat Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	78.18	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Tenaga Kerja
	Tingkat Pekerja/Buruh/Karyawa n yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	69.12		Tingkat Pekerja/Buruh/Karyawa n yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	69.12	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terselenggara dengan Baik	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terselenggara dengan Baik	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	A		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	A	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	53.60%	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	53.60%	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Rasio	14.98	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Rasio	14.98	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	97.51%		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	97.51%	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
Meningkatnya Kualitas Data Gender dan Anak	Persentase Data Gender dan Anak yang Relevan	Persen	39.27%	Meningkatnya Kualitas Data Gender dan Anak	Persentase Data Gender dan Anak yang Relevan	Persen	39.27%	Perangkat Daerah pelaksana

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
								Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Lembaga (Pemerintah & Non Pemerintah) yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak	Persen	9.36%	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Lembaga (Pemerintah & Non Pemerintah) yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak	Persen	9.36%	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 anak	Rasio	0.0285	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 anak	Rasio	0.0285	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	96.34%		Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	96.34%	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Indeks	76.90	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Indeks	76.90	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>				
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Kota Bandung	Persen	100	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Kota Bandung	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pangan
Terjangkaunya aksesibilitas Pangan	Persentase Maksimal Perubahan Harga Pangan	<15Persen	<15%	Terjangkaunya aksesibilitas Pangan	Persentase Maksimal Perubahan Harga Pangan	<15Persen	<15%	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pangan
Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Persentase Nilai AKE ±10%	100Persen	100%	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Persentase Nilai AKE ±10%	100Persen	100%	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pangan
	Persentase Nilai AKP ±10%	100Persen	100%		Persentase Nilai AKP ±10%	100Persen	100%	
Program Penanganan Kerawanan Pangan				Program Penanganan Kerawanan Pangan				
Meningkatnya Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Yang Tertangani (Pangannya)	Persen	58.33%	Meningkatnya Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Yang Tertangani (Pangannya)	Persen	58.33%	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan				Program Pengawasan Keamanan Pangan				
Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persentase Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan  (target sampel 20 komoditas , 112 lokasi penjualan dan pemasaran hasil perikanan total 3300 sampel)	Persen	99.50	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persentase Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan  (target sampel 20 komoditas , 112 lokasi penjualan dan pemasaran hasil perikanan total 3300 sampel)	Persen	99.50	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pangan
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan				Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan				
Meningkatnya Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Tersedia	Unit	-	Meningkatnya Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Tersedia	Unit	-	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pangan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>				
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				
Meningkatnya kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dari penyerahan PSU dan pengadaan tanah	Persentase Proses Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persen	100.00	Meningkatnya kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dari penyerahan PSU dan pengadaan tanah	Persentase Proses Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persen	100.00	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanahan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Daya Dukung Air	Persen	47.00	Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Daya Dukung Air	Persen	47.00	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
Meningkatnya upaya pemerintah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air dan udara	Indeks Respon Lingkungan Hidup aspek Langit Biru	Poin	53.50	Meningkatnya upaya pemerintah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air dan udara	Indeks Respon Lingkungan Hidup aspek Langit Biru	Poin	53.50	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
	Indeks Respon Lingkungan Hidup aspek Kali Bersih	Poin			Indeks Respon Lingkungan Hidup aspek Kali Bersih	Poin		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI				
Meningkatnya konservasi lahan	Persentase Konservasi Daerah Tangkapan Air	Persen	35.89	Meningkatnya konservasi lahan	Persentase Konservasi Daerah Tangkapan Air	Persen	35.89	Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH		
						pelaksana Urusan Lingkungan Hidup		
Persentase tumbuh tanaman di lokasi konservasi	Persen		Persentase tumbuh tanaman di lokasi konservasi	Persen				
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP					
Terpenuhinya Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan Dalam Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Setelah dilakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	Persen	37.5	Terpenuhinya Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan Dalam Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Setelah dilakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	Persen	37.5	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
Terselesaikannya kasus pengaduan pencemaran lingkungan sesuai standar	Persentase Penyelesaian Kasus sesuai SOP	Persen	100.0	Terselesaikannya kasus pengaduan pencemaran lingkungan sesuai standar	Persentase Penyelesaian Kasus sesuai SOP	Persen	100.0	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang menerima peningkatan kapasitas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persen		Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang menerima peningkatan kapasitas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persen		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pelaku	Persentase peningkatan masyarakat dan pelaku	Persen		Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pelaku	Persentase peningkatan masyarakat dan pelaku	Persen		Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	usaha/kegiatan yang dinilai terkait pengelolaan lingkungan		usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	usaha/kegiatan yang dinilai terkait pengelolaan lingkungan		pelaksana Urusan Lingkungan Hidup		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
Meningkatnya Timbulan sampah yang dikelola	Persentase Penanganan Sampah	Persen	Meningkatnya Timbulan sampah yang dikelola	Persentase Penanganan Sampah	Persen	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Lingkungan Hidup		
	Persentase Pengurangan sampah	Persen		Persentase Pengurangan sampah	Persen			
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen			
	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	94.43	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	94.43		
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN					
Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai standar	Persentase pelaku usaha pemegang rintek LB3 yang memperoleh peningkatan kapasitas kompetensi pengelola LB3	Persen	Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai standar	Persentase pelaku usaha pemegang rintek LB3 yang memperoleh peningkatan kapasitas kompetensi pengelola LB3	Persen	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Lingkungan Hidup		
	Persentase pengelolaan sampah B3 Rumah Tangga	Persen		Persentase pengelolaan sampah B3 Rumah Tangga	Persen			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Persen	99.87	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Persen	99.87	Perangkat Daerah pelaksana

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET		INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
								Urusan Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
PERSENTASE KEPEMILIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL	Persen	n/a		PERSENTASE KEPEMILIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL	Persen	n/a		
PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK	Persen	n/a		PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK	Persen	n/a		
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persen	96.99	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persen	96.99	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
PERSENTASE AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN	Persen	n/a		PERSENTASE AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN	Persen	n/a		
PERSENTASE AKTA KELAHIRAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN	Persen	n/a		PERSENTASE AKTA KELAHIRAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN	Persen	n/a		
PERSENTASE AKTA PERKAWINAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN	Persen	n/a		PERSENTASE AKTA PERKAWINAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN	Persen	n/a		
PERSENTASE AKTA PERCERAIAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN	Persen	n/a		PERSENTASE AKTA PERCERAIAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN	Persen	n/a		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH		
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Pengajuan Perjanjian Kerjasama Selesai Ditindaklanjuti	Persen	100	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Pengajuan Perjanjian Kerjasama Selesai Ditindaklanjuti	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan Berjalan Lancar	Persen	100		Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan Berjalan Lancar	Persen	100	
	PERSENTASE INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG DIMANFAATKAN	Persen	n/a		PERSENTASE INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG DIMANFAATKAN	Persen	n/a	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
Meningkatnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks (Skala 0-100)	56.00	Meningkatnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks (Skala 0-100)	56.00	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Menjaga angka kelahiran total (Total fertility Rate/ TFR) pada replacement level	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2.00	Menjaga angka kelahiran total (Total fertility Rate/ TFR) pada replacement level	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2.00	
Menurunnya angka kelahiran remaja (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	9.50	Menurunnya angka kelahiran remaja (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	9.50	
Program Pembinaan Keluarga Berencana				Program Pembinaan Keluarga Berencana				
Meningkatnya Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern	Persen	67.00	Meningkatnya Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern	Persen	67.00	Perangkat Daerah pelaksana Urusan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
	Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)				Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	Persen	47.02	Meningkatnya Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	Persen	47.02	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga Lingkup Dimensi Kebahagiaan	Indeks Pembangunan Keluarga Lingkup Dimensi Kebahagiaan	Indeks	68.65	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga Lingkup Dimensi Kebahagiaan	Indeks Pembangunan Keluarga Lingkup Dimensi Kebahagiaan	Indeks	68.65	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	99.70	Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	99.70	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	Persen	16.27%	Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	Persen	16.27%	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perhubungan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum	Persen	23.239%		Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum	Persen	23.239%	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, gedung dan peralatan perkantoran lainnya	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, gedung dan peralatan perkantoran lainnya	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				
Meningkatnya SPBE yang terpadu dan efisien	Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	Nilai	10.00	Meningkatnya SPBE yang terpadu dan efisien	Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	Nilai	10.00	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
	Nilai Nilai Penerapan ingkup Perencanaan, Eevaluasi dan Pengembangan	Nilai	16.20		Nilai Nilai Penerapan ingkup Perencanaan, Eevaluasi dan Pengembangan	Nilai	16.20	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
	Nilai Penerapan SPBE ingkup Infrastruktur	Nilai	10.00		Nilai Penerapan SPBE ingkup Infrastruktur	Nilai	10.00	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Informasi Melalui Informasi	Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	Nilai	3.0	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Informasi Melalui Informasi	Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	Nilai	3.0	Perangkat Daerah pelaksana

<b>BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Media, Kelompok informasi Masyarakat dan Medsos				Media, Kelompok informasi Masyarakat dan Medsos				Urusan Komunikasi dan Informatika
	Cakupan pengaduan masyarakat melalui LAPOR yang ditindaklanjuti	Persen	98.50		Cakupan pengaduan masyarakat melalui LAPOR yang ditindaklanjuti	Persen	98.50	
	Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	Nilai	0.4		Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	Nilai	0.4	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	Nilai	88.50		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	Nilai	88.50	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Meningkatnya Tata Kelola Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	Meningkatnya Tata Kelola Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84.45		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84.45	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				
Meningkatnya Kepatuhan Koperasi	Persentase Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Persen	20.14	Meningkatnya Kepatuhan Koperasi	Persentase Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Persen	20.14	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam				Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Meningkatnya Fasilitasi Ijin Usaha Simpan Pinjam	Cakupan Fasilitasi ijin Usaha Simpan Pinjam sesuai prosedur	Persen	100	Meningkatnya Fasilitasi Ijin Usaha Simpan Pinjam	Cakupan Fasilitasi ijin Usaha Simpan Pinjam sesuai prosedur	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Penguatan Badan Hukum Koperasi				Program Penguatan Badan Hukum Koperasi				
Meningkatnya Koperasi yang terfasilitasi akta Notaris	Persentase Koperasi yang terfasilitasi akta Notaris Koperasi	Persen	N/A	Meningkatnya Koperasi yang terfasilitasi akta Notaris	Persentase Koperasi yang terfasilitasi akta Notaris Koperasi	Persen	N/A	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				
Meningkatnya SDM Koperasi yang Berkualitas	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	Persen	62.5	Meningkatnya SDM Koperasi yang Berkualitas	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	Persen	62.5	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				
Meningkatnya Keberdayaan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat omset	Persen	8.47	Meningkatnya Keberdayaan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat omset	Persen	8.47	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)				
Meningkatnya Keberdayaan Usaha Mikro	Persentase usaha Mikro yang meningkat keberdayaan usahanya	Persen	15.55	Meningkatnya Keberdayaan Usaha Mikro	Persentase usaha Mikro yang meningkat keberdayaan usahanya	Persen	15.55	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	Persentase Usaha Mikro yang Memenuhi Standar Sertifikasi	Persen	4.03		Persentase Usaha Mikro yang Memenuhi Standar Sertifikasi	Persen	4.03	
	Persentase Kemitraan Usaha Mikro yang Ditindaklanjuti	Persen	6.9		Persentase Kemitraan Usaha Mikro yang Ditindaklanjuti	Persen	6.9	
	Persentase SDM Usaha Mikro yang Kualitasnya Meningkat	Persen	62.5		Persentase SDM Usaha Mikro yang Kualitasnya Meningkat	Persen	62.5	
Meningkatnya keberdayaan Usaha Non Formal	Persentase Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat	Persen	8.31	Meningkatnya keberdayaan Usaha Non Formal	Persentase Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat	Persen	8.31	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan UMKM				Program Pengembangan UMKM				
Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro	Persentase kenaikan omset Usaha mikro	Persen	6.9	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro	Persentase kenaikan omset Usaha mikro	Persen	6.9	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Usaha Mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha	Persen	N/A		Persentase Usaha Mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha	Persen	N/A	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				
Meningkatnya Kinerja serta Kualitas SDM dan Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85	Meningkatnya Kinerja serta Kualitas SDM dan Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Kualitas Standar Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pelayanan penanaman modal	Persen		Meningkatnya Kualitas Standar Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pelayanan penanaman modal	Persen		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan	Persen		Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan	Persen		Perangkat Daerah pelaksana

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	Terpadu Satu Pintu yang Tersedia				Terpadu Satu Pintu yang Tersedia			Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Kondusifitas Iklim Penanaman Modal	Persentase Kebijakan Yang Mendukung Kemudahan Penanaman Modal	Persen		Meningkatnya Kondusifitas Iklim Penanaman Modal	Persentase Kebijakan Yang Mendukung Kemudahan Penanaman Modal	Persen		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Persentase Potensi Penanaman Modal Yang Terpromosikan	Persen		Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Persentase Potensi Penanaman Modal Yang Terpromosikan	Persen		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Memenuhi Ketentuan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Yang Patuh Memenuhi Ketentuan Penanaman Modal	Persen		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Memenuhi Ketentuan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Yang Patuh Memenuhi Ketentuan Penanaman Modal	Persen		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Penanaman Modal
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
MENINGKATNYA OLAHRAGA PENDIDIKAN	Rasio SDM Olahraga Pendidikan	Angka		MENINGKATNYA OLAHRAGA PENDIDIKAN	Rasio SDM Olahraga Pendidikan	Angka		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Rasio ruang terbuka OR Pendidikan	Angka			Rasio ruang terbuka OR Pendidikan	Angka		
	Indeks Literasi Fisik OR Pendidikan	Angka			Indeks Literasi Fisik OR Pendidikan	Angka		
	Indek Dimensi Partisipasi OR Pendidikan	Angka			Indek Dimensi Partisipasi OR Pendidikan	Angka		
	Angka Kebugaran OR Pendidikan	Angka			Angka Kebugaran OR Pendidikan	Angka		
MENINGKATNYA OLAHRAGA REKREASI	Rasio SDM Olahraga rekreasi	Angka		MENINGKATNYA OLAHRAGA REKREASI	Rasio SDM Olahraga rekreasi	Angka		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
	Rasio ruang terbuka OR Rekreasi	Angka			Rasio ruang terbuka OR Rekreasi	Angka		
	Indeks Literasi Fisik OR Rekreasi	Angka			Indeks Literasi Fisik OR Rekreasi	Angka		
	Indek Dimensi Partisipasi OR Rekreasi	Angka			Indek Dimensi Partisipasi OR Rekreasi	Angka		
	Angka Kebugaran OR Rekreasi	Angka			Angka Kebugaran OR Rekreasi	Angka		
MENINGKATNYA OLAHRAGA PRESTASI	Rasio SDM Olahraga Prestasi	Angka		MENINGKATNYA OLAHRAGA PRESTASI	Rasio SDM Olahraga Prestasi	Angka		
	Indek Dimensi Partisipasi OR Prestasi	Angka			Indek Dimensi Partisipasi OR Prestasi	Angka		
	Angka Kebugaran OR Prestasi	Angka			Angka Kebugaran OR Prestasi	Angka		
	Indeks Dimensi Performa	Angka			Indeks Dimensi Performa	Angka		
	Indeks Dimensi Ekonomi	Angka			Indeks Dimensi Ekonomi	Angka		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
MENINGKATNYA KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda wirausaha kerah putih	Persen		MENINGKATNYA KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda wirausaha kerah putih	Persen		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	Persen			Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	Persen		
MENINGKATNYA KUALITAS PEMUDA	Presentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	Persen		MENINGKATNYA KUALITAS PEMUDA	Presentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	Persen		
	Presentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	Persen			Presentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	Persen		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
MENINGKATNYA KUALITAS PEMUDA	Presentase pemuda yang aktif dalam organisasi	Persen		MENINGKATNYA KUALITAS PEMUDA	Presentase pemuda yang aktif dalam organisasi	Persen		Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
Meningkatnya Kualitas Data Yang Terverifikasi	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	Nilai	5,80	Meningkatnya Kualitas Data Yang Terverifikasi	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	Nilai	5,80	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Statistik
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				
Meningkatnya Keamanan Informasi di seluruh Perangkat Daerah	Nilai Penerapan SPBE lingkup Persandian	Nilai	3,70	Meningkatnya Keamanan Informasi di seluruh Perangkat Daerah	Nilai Penerapan SPBE lingkup Persandian	Nilai	3,70	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Persandian
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>				
Program Pengembangan Kesenian Tradisional				Program Pengembangan Kesenian Tradisional				
Meningkatnya Aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dan menjadikan keterlibatannya sebagai sumber penghasilan	Persen	1.20	Meningkatnya Aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dan menjadikan keterlibatannya sebagai sumber penghasilan	Persen	1.20	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kebudayaan
Program Pengembangan Kebudayaan				Program Pengembangan Kebudayaan				
Meningkatnya partisipasi dan apresiasi publik terhadap budaya	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat dalam pertunjukan kebudayaan/kesenian	Persen	28.55	Meningkatnya partisipasi dan apresiasi publik terhadap budaya	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat dalam pertunjukan kebudayaan/kesenian	Persen	28.55	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kebudayaan
Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase warisan budaya takbenda yang dicatat/ditetapkan dalam	Persen	23.95	Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase warisan budaya takbenda yang dicatat/ditetapkan dalam	Persen	23.95	Perangkat Daerah pelaksana

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
register warisan budaya takbenda			register warisan budaya takbenda			Urusan Kebudayaan		
Program Pembinaan Sejarah			Program Pembinaan Sejarah					
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sejarah lokal dan warisan budaya	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang datang berkunjung ke situs sejarah	Persen	8.12	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sejarah lokal dan warisan budaya	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang datang berkunjung ke situs sejarah	Persen	8.12	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kebudayaan
Program Pengelolaan Permuseuman			Program Pengelolaan Permuseuman					
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sejarah lokal dan warisan budaya	Jumlah kunjungan ke Museum Sejarah Kota Bandung	Orang	2,750	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sejarah lokal dan warisan budaya	Jumlah kunjungan ke Museum Sejarah Kota Bandung	Orang	2,750	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kebudayaan
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya					
Meningkatnya pelestarian cagar budaya	Persentase Objek diduga cagar budaya yang ditetapkan atau register	Persen	0.95	Meningkatnya pelestarian cagar budaya	Persentase Objek diduga cagar budaya yang ditetapkan atau register	Persen	0.95	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kebudayaan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	nilai indeks pembangunan literasi masyarakat	Nilai	87.80	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	nilai indeks pembangunan literasi masyarakat	Nilai	87.80	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perpustakaan
Meningkatnya tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai tingkat kegemaran membaca	Nilai	55.75	Meningkatnya tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai tingkat kegemaran membaca	Nilai	55.75	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terselenggara dengan Baik	Persen	89.00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terselenggara dengan Baik	Persen	89.00	Perangkat Daerah pelaksana

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET		INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
								Urusan Kearsipan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	A		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	A	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
meningkatnya pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah	Nilai pengawasan kearsipan	nilai	76.01	meningkatnya pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah	Nilai pengawasan kearsipan	nilai	76.01	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kearsipan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	930	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	930	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	330	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	330	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				
Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Hasil Kelautan dan Perikanan	Persentase Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil Perikanan  (target sampel 20 komoditas , 112 lokasi penjualan dan pemasaran hasil	Persen	99.50	Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Hasil Kelautan dan Perikanan	Persentase Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil Perikanan  (target sampel 20 komoditas , 112 lokasi penjualan dan pemasaran hasil	Persen	99.50	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
perikanan total 2240 sampel)			perikanan total 2240 sampel)					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>					
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					
Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang memenuhi standar usaha destinasi	Persen	58.79%	Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang memenuhi standar usaha destinasi	Persen	58.79%	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pariwisata
Meningkatkan kepatuhan standar usaha pariwisata	Persentase usaha jasa pariwisata memenuhi standar usaha pariwisata	Persen	38.30	Meningkatkan kepatuhan standar usaha pariwisata	Persentase usaha jasa pariwisata memenuhi standar usaha pariwisata	Persen	38.30	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata			Program Pemasaran Pariwisata					
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Brand Equity/Awareness Citra Pariwisata Kota	Poin	4.14	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Brand Equity/Awareness Citra Pariwisata Kota	Poin	4.14	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
Meningkatnya kompetensi dan daya saing sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Tingkat kepuasan pemberi kerja	Persen	65	Meningkatnya kompetensi dan daya saing sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Tingkat kepuasan pemberi kerja	Persen	65	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pariwisata
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM ekraf	Tingkat kepuasan pemberi kerja	Persen	60	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM ekraf	Tingkat kepuasan pemberi kerja	Persen	60	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual					
Meningkatnya perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase keberhasilan fasilitasi hak kekayaan intelektual	Persen	55.00	Meningkatnya perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase keberhasilan fasilitasi hak kekayaan intelektual	Persen	55.00	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pariwisata

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian					
Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana Pertanian	Luas Panen Lahan Pertanian	Ha	Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana Pertanian	Luas Panen Lahan Pertanian	Ha	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanian		
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					
Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Pertanian	Produksi Pertanian	Ton	Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Pertanian	Produksi Pertanian	Ton	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanian		
	Produksi Perkebunan	Ton		Produksi Perkebunan	Ton			
	Populasi Ternak	ekor		Populasi Ternak	ekor			
		14.09			14.09			
		3,384			3,384			
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan Areal Penanganan Bencana Pertanian	Persen	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan Areal Penanganan Bencana Pertanian	Persen	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanian		
Program Penyuluhan Pertanian			Program Penyuluhan Pertanian					
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	Persentase Kelompok Tani Minimal Kategori Kelas Lanjut	Persen	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	Persentase Kelompok Tani Minimal Kategori Kelas Lanjut	Persen	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanian		
Program pengendalian kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			Program pengendalian kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penanganan Diduga Penyakit Hewan Menular Strategis	Persen	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penanganan Diduga Penyakit Hewan Menular Strategis	Persen	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanian		
		100			100			

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor				Program Pengembangan Ekspor				
Meningkatnya daya saing perdagangan produk ekspor	Nilai Ekspor	Juta US\$	326	Meningkatnya daya saing perdagangan produk ekspor	Nilai Ekspor	Juta US\$	326	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perdagangan
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri				
MENINGKATNYA DAYA SAING Pelaku usaha dalam negeri	Persentase daya saing pelaku usaha perdagangan dalam negeri	Persen	90.88	MENINGKATNYA DAYA SAING Pelaku usaha dalam negeri	Persentase daya saing pelaku usaha perdagangan dalam negeri	Persen	90.88	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perdagangan
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen				
MENINGKATNYA Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTP yang Terstandardisasi	Persen	100	MENINGKATNYA Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTP yang Terstandardisasi	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				
STABILNYA HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan Barang Penting	Persen	15	STABILNYA HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan Barang Penting	Persen	15	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perdagangan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
MENINGKATNYA DAYA SAING industri	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	Persen	70.83	MENINGKATNYA DAYA SAING industri	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	Persen	70.83	Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perindustrian
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
Meningkatnya Penerapan Sistem Kerja sebagai Tindaklanjut Penyederhanaan Birokrasi.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Tindaklanjut Penyederhanaan Birokrasi	Kategori	II	Meningkatnya Penerapan Sistem Kerja sebagai Tindaklanjut Penyederhanaan Birokrasi.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Tindaklanjut Penyederhanaan Birokrasi	Kategori	II	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah				Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah			
	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas				Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas			
Meningkatnya Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai		Meningkatnya Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai		Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah
	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
	Tingkat Digitalisasi Arsip				Tingkat Digitalisasi Arsip			
	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah Diselesaikan				Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah Diselesaikan			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4.68	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4.68	Perangkat Daerah pelaksana Unsur

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	93.25	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	93.25	Sekretariat Daerah Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah
	Opini BPK				Opini BPK			
	Indeks SPBE				Indeks SPBE			
	Tindak Lanjut Rekomendasi				Tindak Lanjut Rekomendasi			
	Indeks berAkhlahk				Indeks berAkhlahk			
	Survei Penilaian Integritas				Survei Penilaian Integritas			
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	88.28	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	88.28	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kinerja serta Kualitas SDM dan Layanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bandung Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	90.75	Meningkatnya Kinerja serta Kualitas SDM dan Layanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bandung Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	90.75	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bandung Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	90.75		Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bandung Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	90.75	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bandung Lingkup Asisten Administrasi Umum	Nilai	90.75		Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bandung Lingkup Asisten Administrasi Umum	Nilai	90.75	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah
	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	83.95		Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	83.95	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Nilai	64.99	Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Nilai	64.99	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah		
Meningkatnya Reformasi Hukum	Nilai	80	Meningkatnya Reformasi Hukum	Nilai	80	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah		
	Indeks Pembangunan Statistik			Indeks Pembangunan Statistik				
Meningkatnya Kinerja serta Kualitas SDM dan Layanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bandung Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	90.75	Meningkatnya Kinerja serta Kualitas SDM dan Layanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bandung Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	90.75	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan			Program Perekonomian dan Pembangunan					
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	83.42	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	83.42	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah
	Indeks Sistem Merit			Indeks Sistem Merit				
	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bandung Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	90.75		Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bandung Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	90.75	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Sekretariat Daerah
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			<b>SEKRETARIAT DPRD</b>					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya layanan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD	Nilai kepuasan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD	Persen	82	Meningkatnya layanan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD	Nilai kepuasan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD	Persen	82	Perangkat Daerah pelaksana



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Program Pengelolaan Keuangan Daerah			Program Pengelolaan Keuangan Daerah			Unsur Keuangan		
Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Keuangan
<b>KEPEGAWAIAN</b>				<b>KEPEGAWAIAN</b>				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100%	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100%	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kepegawaian
	Nilai SAKIP Peranga=kat Daerah	Nilai	85.1		Nilai SAKIP Peranga=kat Daerah	Nilai	85.1	
Program Kepegawaian Daerah			Program Kepegawaian Daerah					
Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Lingkup Bidang PPIK, MP, PKAP dan PKA	Nilai Penerapan Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai	100	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Lingkup Bidang PPIK, MP, PKAP dan PKA	Nilai Penerapan Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kepegawaian
	Nilai Penerapan Pengembangan Karir	Nilai	102.5		Nilai Penerapan Pengembangan Karir	Nilai	102.5	
	Nilai Penerapan Manajemen Kinerja, Penghargaan Disiplin	Nilai	114		Nilai Penerapan Manajemen Kinerja, Penghargaan Disiplin	Nilai	114	
	Nilai Penerapan Pengembangan Kompetensi	Nilai	48		Nilai Penerapan Pengembangan Kompetensi	Nilai	48	
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				
Program Pengembangan Kompetensi SDM			Program Pengembangan Kompetensi SDM					
Meningkatnya Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK	Hasil Survei BerAKHLAK	Persentase		Meningkatnya Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK	Hasil Survei BerAKHLAK	Persentase		Perangkat Daerah pelaksana Unsur Penunjang Urusan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
								Pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan
	Hasil Evaluasi Organisasi	Persen			Hasil Evaluasi Organisasi	Persen		
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH</b>				<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH</b>				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Meningkatnya kualitas dukungan pengawasan (Enabler)	Skor komponen kualitas dukungan pengawasan (Enabler)	Nilai	1.96	Meningkatnya kualitas dukungan pengawasan (Enabler)	Skor komponen kualitas dukungan pengawasan (Enabler)	Nilai	1.96	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program Penyelenggaraan Pengawasan				Program Penyelenggaraan Pengawasan				
Meningkatnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Skor komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Nilai	21.57	Meningkatnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Skor komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Nilai	21.57	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Meningkatnya aktivitas pengawasan (Delivery) dan kualitas pengawasan (Result)	Skor komponen aktivitas pengawasan (Delivery) dan kualitas pengawasan (Result)	Nilai	1.2	Meningkatnya aktivitas pengawasan (Delivery) dan kualitas pengawasan (Result)	Skor komponen aktivitas pengawasan (Delivery) dan kualitas pengawasan (Result)	Nilai	1.2	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				
								Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				
<b>KECAMATAN</b>				<b>KECAMATAN</b>				
<b>KECAMATAN ANTAPANI</b>				<b>KECAMATAN ANTAPANI</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan Antapani	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan Antapani	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Lingkup Kecamatan/ Kelurahan				Lingkup Kecamatan/ Kelurahan				pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN ARCAMANIK</b>				<b>KECAMATAN ARCAMANIK</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	80	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	80	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	85	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	85	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN ASTANA ANYAR</b>				<b>KECAMATAN ASTANA ANYAR</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan Astana Anyar	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan Astana Anyar	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN BABAKAN CIPARAY</b>				<b>KECAMATAN BABAKAN CIPARAY</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	Nilai SAKIP Kecamatan Babakan Ciparay	Nilai	A		Nilai SAKIP Kecamatan Babakan Ciparay	Nilai	A	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	50	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	50	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	40.00	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	40.00	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	77.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	77.1	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN BANDUNG KIDUL</b>				<b>KECAMATAN BANDUNG KIDUL</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan

<b>BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	90	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	90	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan Bidang Kecamatan
<b>KECAMATAN BANDUNG WETAN</b>				<b>KECAMATAN BANDUNG WETAN</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan Bandung Wetan	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan Bandung Wetan	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana

<b>BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan				Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan				Unsur Kewilayahan
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN BATUNUNGGAL</b>				<b>KECAMATAN BATUNUNGGAL</b>				
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
								Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN BOJONGLOA KALER</b>				<b>KECAMATAN BOJONGLOA KALER</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	60	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	60	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	60	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	60	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL</b>				<b>KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN BUAHBATU</b>				<b>KECAMATAN BUAHBATU</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan Bahbatu	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan Bahbatu	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN				PROGRAM PENYELENGGARAAN				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN CIBEUNYING KALER</b>				<b>KECAMATAN CIBEUNYING KALER</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN CICENDO</b>				<b>KECAMATAN CICENDO</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan Cicendo	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan Cicendo	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN CINAMBO</b>				<b>KECAMATAN CINAMBO</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan Cinambo	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan Cinambo	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN GEDEBAGE</b>				<b>KECAMATAN GEDEBAGE</b>				

<b>BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN KIARACONDONG</b>				<b>KECAMATAN KIARACONDONG</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	90	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	90	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
	2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN LENGKONG</b>				<b>KECAMATAN LENGKONG</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
								Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	80.5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	80.5	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	75	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	75	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN MANDALAJATI</b>				<b>KECAMATAN MANDALAJATI</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
								Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	75	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	75	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN PANYILEUKAN</b>				<b>KECAMATAN PANYILEUKAN</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta Kualitas SDM dan Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan	Persen	95	Meningkatnya Kinerja serta Kualitas SDM dan Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan	Persen	95	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	Nilai SAKIP Kecamatan Panyileukan	Nilai	A		Nilai SAKIP Kecamatan Panyileukan	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
								Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN REGOL</b>				<b>KECAMATAN REGOL</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan Regol	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan Regol	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	71.42	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	71.42	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN SUKASARI</b>				<b>KECAMATAN SUKASARI</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
administrasi perkantoran Perangkat Daerah				administrasi perkantoran Perangkat Daerah				Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN SUMUR BANDUNG</b>				<b>KECAMATAN SUMUR BANDUNG</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan Sumur Bandung	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan Sumur Bandung	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	75	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	75	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan Bidang Kecamatan
<b>KECAMATAN UJUNGBERUNG</b>				<b>KECAMATAN UJUNGBERUNG</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan Bidang Kecamatan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan Ujungberung	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan Ujungberung	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	60	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	60	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN CIDADAP</b>				<b>KECAMATAN CIDADAP</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan Cidadap	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan Cidadap	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN CIBIRU</b>				<b>KECAMATAN CIBIRU</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN ANDIR</b>				<b>KECAMATAN ANDIR</b>				

<b>BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan Bidang Kecamatan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN RANCASARI</b>				<b>KECAMATAN RANCASARI</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Perangkat Daerah pelaksana

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
								Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	75	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	75	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	85	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	85	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL</b>				<b>KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	95	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	-	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	-	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	-	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	-	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	66.67	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	66.67	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN SUKAJADI</b>				<b>KECAMATAN SUKAJADI</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan Sukajadi	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan Sukajadi	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				

<b>BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN COBLONG</b>				<b>KECAMATAN COBLONG</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan Cobleng	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan Cobleng	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	98	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	98	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	85	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	85	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>KECAMATAN BANDUNG KULON</b>				<b>KECAMATAN BANDUNG KULON</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
	2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A		2. Nilai SAKIP Kecamatan....	Nilai	A	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Kewilayahan
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025				PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	SATUAN	TARGET	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					
PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
Meningkatnya Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Indeks	3.73	Meningkatnya Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Indeks	3.73	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pemerintahan Umum
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
Meningkatnya Stabilitas Politik	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Stabilitas Politik	Indeks	4.82	Meningkatnya Stabilitas Politik	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Stabilitas Politik	Indeks	4.82	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pemerintahan Umum
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
Meningkatnya Kualitas Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	Indeks	3.75	Meningkatnya Kualitas Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	Indeks	3.75	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pemerintahan Umum
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
Meningkatnya Ketahanan Sosial dan Budaya	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	Indeks	3.75	Meningkatnya Ketahanan Sosial dan Budaya	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	Indeks	3.75	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pemerintahan Umum

<b>BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RPJMD TAHUN 2025-2029</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD-P THUN 2025</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	Indeks	3.95	Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	Indeks	3.95	Perangkat Daerah pelaksana Unsur Pemerintahan Umum

Program prioritas yang dimuat pada kedua tabel diatas, selanjutnya akan dirinci menjadi kegiatan dan sub kegiatan di Renja Perangkat Daerah. Program-program tersebut dilaksanakan selain untuk mencapai target sasaran strategis, juga dalam rangka melaksanakan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Program prioritas kepala daerah bersifat sangat penting, mendesak, dan berdaya ungkit bagi perwujudan visi dan misi dan akan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4. 8**  
**Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota**  
**Bandung Tahun 2025-2029**

<b>Pokok Visi</b>	<b>Misi</b>	<b>No</b>	<b>Program Prioritas Kepala Daerah</b>
<b>Unggul</b> SDM berkualitas dan berdaya saing	<b>Misi 1:</b> Mewujudkan Kualitas Hidup Warga Kota Bandung yang Unggul	1	Optimasi Layanan Kesehatan Dasar
		2	Penurunan Angka Prevalensi Stunting melalui Peningkatan Peranan Puskesmas dan Posyandu
		3	Program Terpadu Pengentasan Kemiskinan Esktreem
		4	Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Sekolah Negeri dan Swasta
<b>Terbuka</b> Inklusif dalam riset, pola pikir, tata kelola wilayah, serta ramah investasi	<b>Misi 2:</b> Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan	5	PRAKARSA Bandung UTAMA
		6	Optimasi Trading Tourism and Investment UTAMA
<b>Amanah</b> Tata kelola pemerintahan, birokrasi, dan pelayanan publik yang andal	<b>Misi 3:</b> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Inovatif	7	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi
<b>Maju</b> Ekonomi berkelanjutan, termasuk ekonomi kreatif, merata dan kompetitif	<b>Misi 4:</b> Mewujudkan Kota Bandung yang Maju, Kreatif, dan Berdaya Saing Dalam Perekonomian dan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan	8	Penciptaan lapangan pekerjaan baru dan penyerapan tenaga kerja
		9	Optimasi penggunaan dan pemanfaatan Asset untuk peningkatan PAD
		10	Ekstensifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		11	Pembentukan UMKM Center UTAMA
		12	Peningkatan Kualitas dan Layanan Infrastruktur Jalan, Trotoar dan Penerangan jalan Umum

Pokok Visi	Misi	No	Program Prioritas Kepala Daerah
		13	Penataan Transportasi Publik, Smart Parking dan <i>Cashless Payment</i>
		14	Optimasi ketersediaan air bersih dan air limbah untuk kawasan kumuh dan rawan sanitasi
		15	Optimasi Penanganan Sampah Bandung UTAMA
<b>Agamis</b> Karakter masyarakat dan budaya yang religius	<b>Misi 5:</b> Membentuk Karakter Warga Kota Bandung yang Agamis, Moderat, dan Toleran	16	Optimasi ekosistem kebudayaan berbasis kewilayahan untuk meningkatkan pemajuan kebudayaan

Sumber: RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029

**Tabel 4. 9**  
**KESELARASAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL**  
**DENGAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO PROVINSI DAN KOTA BANDUNG**  
**TAHUN 2025**

NO	INDIKATOR KERANGKA EKONOMI MAKRO	TARGET KOTA BANDUNG SESUAI PERUBAHAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025	TARGET RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2025	KET.
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		6.29	5.1	
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		9.13	7.35	
3	Gini Ratio		0.445	0.440	
4	Indeks Pembangunan Manusia		83.75	83.97	
5	Tingkat Kemiskinan (%)		4.18	3.68	
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		71,790.19	71,790.19	

**Tabel 4. 10**  
**DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL**  
**TAHUN 2025**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	<b>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38,461,500.00
2	<b>Melanjutkan pengembangan infrastruktur</b>	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas	Penyusunan/Review /Legalisasi	1,226,565,115.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
	<b>dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</b>		Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kebijakan Bidang PKP	
3			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	33,936,700,893.55
4				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	392,598,750.00
5		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	94,547,802.42
6		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	921,771,640.00
7				Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	976,896,094.00
8		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	290,975,645.00
9				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7,923,651,814.00
10				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	67,926,284.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
11				Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	30,710,000,000.00
12				Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1,137,600,000.00
13				Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	369,253,000.00
14		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	2,956,697,665.00
15				Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	679,808,926.00
16		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	2,245,817,886.54
17				Normalisasi/Restorasi Sungai	2,500,000,000.00
18				Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1,022,926,966.00
19				Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	4,665,134,636.20
20				Pembangunan Polder/Kolam Retensi	13,580,680,827.26
21				Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	12,612,595,834.82
22				Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	7,833,905,697.00
23				Peningkatan Polder/Kolam Retensi	397,751,344.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
24				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	-
25				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	532,832,530.00
26				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	623,012,752.50
27				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	1,753,333,085.00
28				Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	348,032,425.86
29				Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	2,026,073,498.40
30				Rehabilitasi Tanggul Sungai	41,238,964,738.00
31		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	113,119,108.45
32			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	423,679,603.00
33				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	105,602,196.15
34		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	9,737,628,900.00
35				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	-
36			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	9,148,481,546.56
37			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial	987,860,595.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
38				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	195,166,860.00
39				Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-
40			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1,597,307,000.00
41		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	88,248,884,919.43
42				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3,514,397,150.00
43		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	309,593,145.84
44				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,887,092,356.68
45				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3,014,395,492.35
46				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	368,275,240.80
47			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72,167,541,588.00
48			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	285,777,526.00
49				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,747,614,596.00
50				Penyediaan Bahan/Material	37,149,484.44
51				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	946,047,121.07
52				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	271,049,351.85
53				Penyediaan Peralatan dan	7,267,887,503.34

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
				Perlengkapan Kantor	
54				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	572,822,917.41
55				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,344,389,600.00
56			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	802,740,900.00
57				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,372,546,163.50
58				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	847,000,391.00
59				Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	14,860,194,539.50
60				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5,022,401,518.00
61				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10,296,561,124.00
62			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	649,490,360.00
63				Pengadaan Mebel	802,141,198.96
64			Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	34,965,595,122.91
65			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8,944,187,775.00
66				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13,682,684,008.28
67				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46,050,000.00
68				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,300,000.00
69			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	749,268,765.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			Perangkat Daerah		
70				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	88,981,383.40
71		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	5,637,852,262.50
72				Pembangunan Jalan	14,883,700,107.00
73				Pemeliharaan Berkala Jalan	120,376,064,444.26
74				Pemeliharaan Rutin Jalan	4,159,462,051.58
75				Pengelolaan Leger Jalan	305,865,217.50
76				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4,150,065,182.50
77				Rehabilitasi Jalan	22,218,229,063.00
78				Rehabilitasi Jembatan	7,000,000,000.00
79				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1,552,143,525.00
80		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	14,165,540,542.00
81				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2,612,519,000.00
82			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	459,984,032.00
83			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2,357,565,531.00
84			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	6,309,414,806.00
85			Pengujian Berkala	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian	1,494,850,173.24

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			Kendaraan Bermotor	Berkala Kendaraan Bermotor	
86				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3,404,622,707.00
87				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	660,146,207.00
88				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	86,648,905.00
89				Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1,827,881,376.00
90			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5,336,813,200.00
91				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21,007,227,833.00
92			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	61,578,350,252.00
93				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	14,265,925,001.15
94				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	6,027,710,660.00
95				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	22,703,843,917.00
96		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	87,127,724.00
97		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1,062,863,174.00
98			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	439,084,604.00
99				Sosialisasi Kebijakan dan	574,100,500.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
				Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
100		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,701,204,000.00
101		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1,059,988,905.05
102				Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50,158,415,090.00
103	<b>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</b>	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	48,100,000.00
104				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	157,800,000.00
105				Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	319,346,700.00
106		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	526,439,044.00
107				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	322,089,270.00
108			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	31,165,029.00
109		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26,596,524,480.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
		DAERAH KABUPATEN/KOTA			
110			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13,971,859.00
111				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	303,640,248.34
112				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	109,844,147.06
113				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43,426,461.00
114				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	517,018,378.49
115				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	258,867,672.83
116				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17,500,000.00
117			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74,685,000.00
118				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	258,159,599.41
119				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	619,691,000.00
120			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133,956,108.00
121				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,163,944,428.85
122			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,400,690.10
123		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1,583,779,200.08
124			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	55,144,000.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
125	<b>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.</b>	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,739,056,948.98
126				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,832,214,146.00
127			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	105,805,413.26
128				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	337,190,865.00
129		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1,191,440,180.00
130				Penataan Administrasi Pemerintahan	332,790,000.00
131				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1,767,140,900.56
132		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115,083,890.00
133				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,009,341,125.00
134		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6,959,700.00
135			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30,426,919.00
136	<b>Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).</b>	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1,754,828,478.80
137		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,	297,285,000.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
		ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
138				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1,275,000,000.00
139		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	507,490,000.00
140				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1,500,000,000.00
141		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	605,412,100.00
142				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	17,760,000.00
143				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	1,000,000,000.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
				Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
144				Pembentukan Paskibraka	673,018,398.00
145				Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	340,395,000.00
146		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	381,900,000.00
147				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	368,685,977.00
148				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	701,732,000.00
149				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	21,865,928,000.00
150				Penyusunan Bahan Perumusan	-

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
				Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
151				Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-
152		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	419,911,000.00
153				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	432,960,030.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
154				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11,870,677,896.00
155		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	87,727,924.00
156				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	537,300,000.00
157			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,835,874,688.00
158			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17,077,200.00
159				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170,448,521.00
160				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	82,195,000.00
161				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,020,000.00
162				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104,111,657.00
163				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42,846,246.00
164				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	386,224,866.00
165			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,380,000.00
166				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	218,631,000.00
167				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	782,396,100.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
				Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
168			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	254,498,924.00
169				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141,080,000.00
170			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	256,608,000.00
171				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,242,083,216.00
172				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39,336,000.00
173			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139,120,000.00
174	<b>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.</b>	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	144,000,000.00
175		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	456,982,655.00
176			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	268,764,121.00
177		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	202,392,706.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota	
178				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	344,065,000.00
179			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	495,920,000.00
180				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68,530,000.00
181				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60,880,000.00
182				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	334,870,000.00
183		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	-
184				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	470,819,000.00
185				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	467,437,000.00
186				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	8,010,211,016.00
187			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	Pembangunan Puskesmas	40,950,311,020.46

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			Daerah Kabupaten/Kota		
188				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	16,607,105,898.00
189				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9,001,947,951.60
190				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	35,817,721,852.00
191				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	71,830,414,801.40
192				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	70,800,000.00
193				Pengembangan Rumah Sakit	27,555,110,598.17
194				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2,000,000,000.00
195			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	105,700,000.00
196				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4,611,855,238.00
197				Operasional Pelayanan Puskesmas	25,924,430,326.00
198				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	728,043,000.00
199				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,186,437,001.00
200				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	280,073,317,600.00
201				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	185,426,250.00
202				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3,411,538,500.00
203				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5,965,284,000.00
204				Pengelolaan Pelayanan	202,649,740.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
				Kesehatan Ibu Bersalin	
205				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,349,925,000.00
206				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	126,000,000.00
207				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	549,582,000.00
208				Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	391,594,200.00
209				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	694,281,160.00
210				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	215,680,000.00
211				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4,302,146,718.78
212				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	247,410,000.00
213				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2,204,614,980.00
214				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	558,900,000.00
215				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2,172,062,276.00
216				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1,507,596,610.00
217				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	81,434,000.00
218				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2,345,972,000.00
219				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	216,224,800.00
220				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	663,162,022.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
221				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	799,840,000.00
222				Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	400,980,000.00
223				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	2,233,414,500.00
224			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	8,324,765,713.00
225		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	66,840,000.00
226				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	171,500,000.00
227		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	350,000,000.00
228				Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	250,000,000.00
229			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	5,674,968,000.00
230			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	247,972,000.00
231		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	349,830,600.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
				Kapasitas Bidang Pendidikan	
232				Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	163,260,000.00
233				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	507,480,092.00
234				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	73,800,000.00
235				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	199,440,000.00
236				Pembangunan Ruang Kelas Baru	698,040,000.00
237				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1,175,849,200.00
238				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2,847,933,199.00
239				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	331,780,000.00
240				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	99,900,000.00
241				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9,760,000.00
242				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	3,976,274,400.00
243				Pengadaan Perlengkapan PAUD	400,000,000.00
244				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	224,457,984.00
245				Pengelolaan Dana BOP PAUD	27,907,860,000.00
246				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1,100,659,500.00
247				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	419,240,000.00
248				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	13,248,120,000.00
249				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	460,831,000.00
250				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	537,981,500.00
251				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	343,691,000.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
252				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	673,060,000.00
253			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	531,560,000.00
254				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	799,327,400.00
255				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	262,490,496.03
256				Pengadaan Mebel Sekolah	344,357,988.90
257				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	26,032,700,000.00
258				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	121,500,000.00
259				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	80,990,000.00
260				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,072,040,000.00
261				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1,015,969,814.90
262				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	837,700,850.00
263			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	762,030,000.00
264				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	173,115,000.00
265				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	204,600,000.00
266				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	97,290,000.00
267				Pembangunan Ruang Kelas Baru	21,929,873,040.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
268				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	18,781,723,868.00
269				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	111,300,000.00
270				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	222,600,000.00
271				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1,562,281,730.00
272				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	194,580,000.00
273				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	8,004,080,000.00
274				Pengadaan Mebel Sekolah	21,331,824,784.00
275				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4,298,280,000.00
276				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	5,663,628,000.00
277				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	189,443,471,574.00
278				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1,997,321,100.00
279				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	334,000,000.00
280				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	352,300,000.00
281				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	8,596,680,000.00
282				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	58,846,160,000.00
283				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	496,040,000.00
284				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	11,453,258,159.00
285				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,056,126,400.00
286				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	621,540,000.00
287			Pengelolaan Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau	866,955,000.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			Sekolah Menengah Pertama	Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
288				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	141,795,000.00
289				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	401,110,000.00
290				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	124,110,000.00
291				Pembangunan Fasilitas Parkir	500,000,000.00
292				Pembangunan Ruang Kelas Baru	8,494,154,300.00
293				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9,316,841,148.00
294				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	25,665,559,314.00
295				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	115,800,000.00
296				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	404,600,000.00
297				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2,255,518,500.00
298				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	69,885,000.00
299				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	5,773,668,000.00
300				Pengadaan Mebel Sekolah	64,182,502,175.00
301				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	8,935,800,000.00
302				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	90,323,725,999.00
303				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	112,168,956,981.00
304				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	639,750,000.00
305				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	288,520,000.00
306				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana	148,185,000.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
				BOS Sekolah Menengah Pertama	
307				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	17,871,600,000.00
308				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17,488,000,000.00
309				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	491,440,000.00
310				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8,809,096,345.00
311				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5,952,972,300.00
312				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	428,100,000.00
313		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	199,194,400.00
314				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	307,934,000.00
315		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	39,700,000.00
316				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	86,600,000.00
317			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	298,440,000.00
318				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	276,720,000.00
319		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4,417,605,685.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
320			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,630,635,013.00
321				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	474,592,000.00
322				Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	97,396,500.00
323		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27,640,000.00
324				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53,180,200.00
325				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	135,004,800.00
326			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	372,585,000.00
327				Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	326,178,000.00
328				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1,150,919,600.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
329			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	868,050,000.00
330		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	78,357,000.00
331				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	271,932,000.00
332			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	343,850,000.00
333				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	136,791,000.00
334				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	107,973,840.00
335				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150,980,000.00
336				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	536,004,395.00
337				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	525,497,000.30
338				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	180,004,000.00
339				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1,327,237,465.00
340			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	253,310,100.00
341				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	168,252,900.00
342				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,696,636,000.00
343				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,667,477,728,961.00
344			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	8,476,251,844.53

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
				Berbasis Elektronik pada SKPD	
345				Fasilitas Kunjungan Tamu	49,830,000.00
346				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	490,784,378.00
347				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,108,165,886.00
348				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	735,273,244.31
349				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	188,276,748.75
350				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,939,230,593.77
351				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	351,430,196.70
352				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,393,852,282.87
353			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127,088,100.00
354				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,427,086,821.00
355				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,244,911,852.00
356				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8,428,062,265.84
357				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3,710,852,779.00
358				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,794,800,491.50
359			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,495,024,820.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
360				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8,363,565,260.00
361				Pengadaan Mebel	1,860,943,770.10
362				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,187,989,941.75
363				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	253,949,607.50
364				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229,278,603.00
365			Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	303,851,895,163.00
366			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13,470,029,095.00
367				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41,215,019,395.87
368				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	214,459,110.00
369				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24,251,944.00
370			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	693,899,545.73
371				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,087,012,855.58
372		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	86,017,500.00
373			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	186,466,770.00
374		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	130,000,000.00
375				Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak,	98,120,800.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
				desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	
376			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	803,685,400.00
377				Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	88,400,056.00
378			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	231,620,000.00
379				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	557,510,200.00
380		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	24,723,600.00
381			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	224,840,000.00
382				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	277,029,944.00
383			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan	91,000,000.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
384				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	374,500,000.00
385		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	144,501,200.00
386			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	170,078,946.70
387			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	315,050,225.00
388	<b>Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</b>	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	1,119,282,961.00
389			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2,056,896,127.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
390				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	358,908,000.00
391			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	334,208,000.00
392		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	186,376,429.00
393			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	4,836,305,140.00
394				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	479,208,702.63
395			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6,504,731,988.00
396				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	227,992,000.00
397				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,002,505,285.00
398				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3,660,399,999.79
399				Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	279,690,500.00
400				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	90,810,000.00
401				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2,095,446,220.00
402		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1,045,878,572.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
		DAERAH KABUPATEN/KOTA			
403			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37,215,827,633.00
404			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	72,500,000.00
405				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21,517,344.00
406				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	231,160,750.00
407				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70,385,035.00
408				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35,599,522.00
409				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,020,449,763.87
410				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58,081,794.71
411				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274,203,000.00
412			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70,940,000.00
413				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,399,992,800.00
414			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49,800,000.00
415				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139,864,000.00
416		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	476,533,495.00
417	<b>Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan</b>	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	443,197,250.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
	<b>pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.</b>				
418				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	266,099,500.00
419				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	324,326,321.00
420			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	161,010,000.00
421				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	463,681,000.00
422				Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3,013,607,478.00
423			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	55,233,753,728.00
424				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	272,995,040.00
425				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	8,382,543,498.00
426		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	89,688,000.00
427				Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	89,820,000.00
428			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	79,170,750.00
429		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	301,661,600.00
430				Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	3,749,634,779.00
431				Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	303,438,207.00
432				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1,014,632,900.00
433				Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah	2,874,997,482.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
				dalam rangka penyelenggaraan SPBE	
434				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	520,566,032.00
435				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	268,756,806.00
436		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2,172,283,698.00
437				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	492,257,080.00
438				Penatausahaan Barang Milik Daerah	853,672,851.60
439				Pengamanan Barang Milik Daerah	10,611,557,743.00
440				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	33,644,989.00
441				Penyusunan Standar Harga	340,728,503.00
442				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	126,432,461.40
443		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	258,998,000.00
444				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	502,669,097.00
445				Pelayanan Informasi Publik	1,036,256,750.00
446				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1,154,720,900.00
447				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	209,800,000.00
448				Penyusunan Konten	61,200,000.00
449				Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	1,086,000,000.00
450				Relasi Media	3,236,079,190.00
451		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	167,283,000.00
452				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	393,845,320.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
				Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
453				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	258,540,000.00
454				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	164,726,424.50
455				Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	58,786,387.50
456			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	468,353,275.00
457				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	137,946,562.00
458				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	188,914,752.00
459				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	427,293,938.00
460				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	33,599,991.00
461				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang	90,689,885.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
				Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
462				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	191,958,710.00
463		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	151,594,320.00
464			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5,975,934,076.00
465				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	1,093,433,000.00
466				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	649,924,104.00
467				Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	49,336,105.00
468			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	639,800,000.00
469				Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	54,606,500.00
470				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1,554,855,973.30
471				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	63,666,100.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
472				Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	213,400,000.00
473				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	563,817,616.00
474		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	296,719,234.00
475			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	149,618,264.00
476				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1,816,691,077.99
477				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
478				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	898,061,240.00
479			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	272,533,791.59
480				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	261,490,167.00
481				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	171,577,908.00
482				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	323,099,274.25
483				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	151,647,875,329.00
484			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	96,485,196.00
485				Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,742,502,970.57
486				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	212,330,000.00
487				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	496,791,398.00
488				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,070,331,710.90
489				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,313,461,429.20

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
490				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	450,706,779.00
491				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,056,441,034.25
492				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	380,614,359.43
493				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,952,433,275.00
494			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitas Keprotokolan	1,233,453,928.00
495				Fasilitas Komunikasi Pimpinan	619,715,405.00
496				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	263,222,543.00
497			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel	139,917,364.80
498				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,208,455,139.00
499				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	757,045,308.00
500				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,434,614,506.95
501				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8,862,458,051.00
502				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,422,587,265.00
503			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,705,866,946.59
504				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7,508,680,480.00
505				Pengadaan Mebel	1,974,975,199.59

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
506				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,847,074,521.00
507			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86,361,224,288.00
508				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45,778,864,493.90
509				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,422,715,000.00
510				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,642,600.00
511			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	673,609,728.62
512				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	93,070,455.00
513				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	66,198,965.20
514				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	69,952,380.27
515				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	110,382,781.00
516				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,273,894,572.10
517		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,150,146,400.00
518			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	110,953,870.00
519		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	409,024,208.00
520		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	438,475,810.00

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
521				Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	232,777,600.00
522				Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	208,764,500.00
523		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	611,532,000.00
524				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	535,567,000.00
525				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	366,561,000.00
526			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1,116,774,144.00
527				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	236,975,000.00
528				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	149,301,762.00
	<b>Grand Total</b>				<b>5,030,510,599,503.55</b>